

STUDY KOMPARASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA REFORMASI DENGAN ERA INDUSTRI 4.0

Ratih Novi Septian¹ & Silviana Lilis Apriliani²

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: ratihnovi@upi.edu¹, & silvianalilisapriliani@upi.edu²

Abstrak

Era reformasi dan revolusi industri 4.0 adalah era yang saling berkelanjutan. Namun, setiap kebijakan yang diambil pada setiap era tentu saja berbeda-beda, menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan pada zaman masing-masing. Begitu juga dalam bidang pendidikannya. Selama periode awal reformasi hingga era revolusi industri 4.0, kebijakan pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan. Dan juga, setiap era memiliki karakteristik masing-masing. Untuk itu, melalui studi literatur, penulis membahas bagaimana perbedaan dari kedua era ini. Penulis mengumpulkan banyak bahan literatur yang kemudian dikaji dan disimpulkan. Di dapatkan bahwa kebijakan pendidikan di kedua era ini sangat terlihat atau sangat menonjol pada arah tujuan pembelajaran dan kurikulumnya. KBK dan KTSP dipilih untuk menjadi kurikulum di era reformasi, serta Kurikulum 2013 menjadi pilihan pemerintah Indonesia di era revolusi industri 4.0. Namun, pada dasarnya pelaksanaan pembelajaran dari keduanya sama-sama mengharapkan sistem *student center*. Di era reformasi, pemerintah fokus pada pengembangan lokalitas, sedangkan di era industri pemerintah memfokuskan pada keterampilan individu untuk menghadapi persaingan global.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Era Reformasi, Revolusi Industri 4.0

Abstract

The era of reform and the 4.0 industrial revolution is a mutually sustainable era. However, each policy taken in each era is of course different, adjusting the needs and developments of each other's times. So does his field of education. During the early period of reform up to the era of the industrial revolution 4.0 education policy in Indonesia underwent many changes. And also, each era has its own characteristics. To this end, through the study of literature, the author discusses how the differences from these two eras are. The author collects many literature materials that are then examined and inferred. It is earned that educational policies in these two eras are highly visible or very prominent in the direction of its learning goals and curriculum. KBK and KTSP were selected to be curriculums in the reform era, as well as the 2013 Curriculum became the Indonesian government's choice in the industrial era. However, basically the learning implementation of the two equally expects the student center system. In the era of reform, the government focuses on developing locality, whereas in the era of the industrial revolution, the government focuses on individual skills to deal with global competition.

Keywords: Education Policy, Reformation Era, Industrial Revolution 4.0.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan sebuah aturan tertulis yang dibuat demi mencapai suatu tujuan. Kebijakan biasanya dibuat oleh badan atau perorangan yang memiliki wewenang terhadapnya. Dengan adanya kebijakan, diharapkan proses pelaksanaan suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi, tidak

semua kebijakan disetujui bahkan hingga menimbulkan kontra di dalamnya.

Menurut Arwildayanto & Sumar (dalam Mareta et al., 2021), kebijakan merupakan suatu tuntunan tertulis yang menjadi keputusan organisasi secara formal, memiliki sifat yang mengikat, serta memberi aturan atas cara seorang individu dalam berperilaku dengan tujuan

menumbuhkan hierarki nilai yang baru dalam masyarakat. Menurut Maskuri, (2017), kebijakan merupakan suatu tuntunan serta prinsip yang diterapkan guna dipilih pada prosedur pengarahan penungutan keputusan.

Kebijakan memiliki keterkaitan dengan ide manajemen organisasi serta merupakan model resmi yang diakui oleh lembaga atau pemerintah, oleh sebab itu mereka melakukan upaya untuk terus mencapai atau mengejar tujuannya (Syafaruddin 2008). Tak jarang kebijakan disamaratakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Pilar utama yang melandasi sebuah kebijakan ialah pertimbangan akal. Suatu kebijakan tentunya bukan semata-mata hanya merupakan *output* dari pertimbangan akan manusia semata. Namun, akal manusia adalah sesuatu yang begitu mendominasi pada setiap pengambilan keputusan yang bersumber dari bermacam opsi pada pengambilan keputusan kebijakan (Solichin 2015). Kebijakan bukan hanya sebagai pengatur tatanan operasi internal, melainkan pula menyuguhkan pengaturan sehubungan dengan peran secara definitif dalam suatu sistem (Sagala 2017)

Berbicara mengenai kebijakan, tentu meliputi beberapa aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, medis/kesehatan, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, kebijakan-kebijakan tersebut dibuat oleh yang berwewenang, dalam hal ini menteri bidang yang bersangkutan. Warga Indonesia pastilah sudah paham dengan sistem kebijakan Indonesia. Bagaimana sulitnya suatu kebijakan dirumuskan, diajukan, dan ditetapkan. Nanang, (2013) berpendapat bahwa kebijakan memiliki tiga unsur yang diantaranya terdiri atas pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, serta kebijakan publik.

Pelaku kebijakan ini diantaranya adalah kelompok partai politik, pemimpin

terpilih, agen pemerintah, warga negara, para analisis kebijakan sendiri, serta perserikatan buruh. Lingkungan kebijakan, adalah kondisi tertentu pada kejadian di sekitaran isu kebijakan terjadi, yang memberi pengaruh serta berpengaruh pada pencipta kebijakan, mengandung langkah yang sifatnya dialektis, berarti bahwa sudut pandang subjektif serta objektif yang berasal dari pencipta kebijakan tak akan terpisahkan pada pelaksanaannya.

Kebijakan pendidikan menurut Yuliah, (2020) dipandang sebagai suatu pengatualisasian atas visi serta misi pendidikan bertema hakikat individu yang didasarkan pada politik serta filsafat individu pada latar belakang situasi ekonomi, politik, budaya, serta sosial masyarakatnya. (Hasbullah 2015) mengartikan kebijakan pendidikan berupa langkah secara keseluruhan serta output dari percetus tahap-tahap strategi pendidikan yang diruikan atas visi serta misi pendidikan, hingga terwujudlah capaian pendidikan dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Herlambang, (2021) dalam bukunya, bahwa pendidikan bertujuan untuk membebaskan setiap individu dari segala kekangan cara berfikir sempit dan keliru yang bermuara pada kebodohan.

Pendidikan juga merupakan bidang yang memiliki esensi penting pada kehidupan individu, lebih spesifik lagi bangsa Indonesia yang menjadi ketentuan wajib pada pembangunan suatu peradaban tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas serta perannya pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkemampuan adaptif serta futuristik dengan tetap memegang teguh karakternya berdasarkan pendekatan budaya (Y.T. Herlambang, 2016).

Prasojo, (2012) pula mengemukakan kebijakan pendidikan sebagai sebuah pertimbangan yang didasari oleh tatanan norma serta sejumlah pertimbangan atas hal-hal yang sifatnya dinamis atas situasi yang terjadi, pertimbangan itu merupakan suatu landasan dalam pengoperasian pendidikan dengan sifat yang berlembaga, pertimbangan ini pula digunakan sebagai persiapan awal yang menjadi panduan dalam musyawarah guna mencapai sasaran yang sifatnya melembaga. Tidak hanya sebagai tanggungan oleh beberapa orang atau golongan tertentu, kebijakan pendidikan telah menjelma sebagai urusan dari setiap pihak (Arwildayanto & Sumar Mareta et al., 2021). Kebijakan pendidikan sejatinya tercipta dari ilmu pendidikan yang merupakan ilmu praktis, mempersatukan teori dengan praktek pendidikan sebagai pengatur kehidupan manusia yang bertaut dengan keperluan layanan pendidikan guna mencerdaskannya. Karenanya, kebijakan pendidikan ini tersusun atas langkah-langkah menganalisis kebijakan, merumusan, praktek, dan penilaian atas kebijakan yang dilaksanakan (Nugroho and Dwijowijoto 2004).

Kebijakan harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Salah satu aspek kebijakan yang harus selalu mengikuti peradaban ialah kebijakan pendidikan. Kebijakan yang hampir selalu di-upgrade setiap tahunnya, yaitu kebijakan pendidikan. Akhir-akhir ini kebijakan pendidikan juga mengundang banyak perhatian dan tanggapan dari masyarakat. Sampai-sampai muncul istilah “ganti menteri, ganti kurikulum”. Hal ini tidak perlu dipermasalahkan, karena setiap pemimpin memiliki pemikiran, gaya, dan persepsinya sendiri-sendiri. Akan tetapi, setiap kebijakan yang akan dibuat, harus memperhatikan hak dan kewajiban dari siswa dan guru sebagai pelaku pendidikan.

Pergantian kebijakan pendidikan dari waktu ke waktu seharusnya dapat terus membaik. Terlebih lagi, Indonesia memiliki beberapa masa pemerintahan sejak merdeka. Masa pemerintahan itu diantaranya, orde lama, orde baru, dan reformasi. Dan kemudian era peradaban baru yang disebut era revolusi industri 4.0. Dengan perbedaan perkembangan peradaban pada masa-masa tersebutlah yang menyebabkan kebijakan pendidikannya juga berbeda.

Menengok ke belakang, kebijakan pendidikan di masa reformasi sangat menarik untuk dibahas. Di mana masa itu adalah masa lahirnya kehidupan atau peradaban baru sebagai warga negara yang benar-benar sudah merdeka. Oleh karena itu, akan menarik jika dibandingkan kebijakan pada masa reformasi dengan masa revolusi industri 4.0 ini. Revolusi industri 4.0 dalam bidang pendidikan adalah sebuah respon dari kebutuhan revolusi saat ini, seperti keseimbangan berjalan antara teknologi dan manusianya agar menciptakan peluang dan inovasi baru yang kreatif (Sasikirana and Herlambang 2020). Walaupun rentang waktunya belum cukup lama antara masa reformasi dan revolusi industri, tetapi sudah menjadi rahasia umum bagaimana perbedaan perkembangan kehidupan reformasi dengan revolusi industri. Kebijakan dan kurikulum apa yang digunakan pada masing-masing masa ini, tantangan apa yang harus dilewati guru dan atau siswa, dan bagaimana solusi terhadap masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, penulis membahas bagaimana perbedaan dari kedua era ini. Penulis mengumpulkan banyak bahan literatur yang kemudian dikaji dan disimpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1.1 Perbandingan Kebijakan Pendidikan Masa Reformasi dan *industry 4.0*

	Masa Reformasi	Era <i>industry 4.0</i>
Kebijakan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 22 tahun 1999 - Pengenalan model "Manajemen Berbasis Sekolah". - UU No.20 tahun 2003 	<ul style="list-style-type: none"> - Permendikbud No. 36 tahun 2013 - Permendikbud No. 160 tahun 2014
Kurikulum	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)/2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/2006.	Kurikulum 2013 (K13)
Arah tujuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan lokalitas - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan 4C; <i>critical-thinking and problem-solving skills, communication and collaboration skills, creativity and innovation skills.</i> - Literasi teknologi informasi dan komunikasi. - Penguatan pendidikan karakter pada pengembangan karakter (character building) dan nilai spiritual (spiritual value).
Masalah kebijakan pendidikan yang dihadapi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal. b. Proses pendidikan Indonesia masih jauh dari kata memperjuangkan hak-hak siswa. c. Anggaran biaya. 	Dalam berbagai penelitian yang dilaksanakan hingga pada tahun 2019 mengenai penerapan kurikulum 2013, didapati sebagian besar guru belum memahami perihal implementasi kurikulum 2013.
Solusi yang telah diupayakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan dari kurikulum KBK ke KTSP. b. UU No. 14 tahun 2005 pasal 4. 	Sosialisasi kepada guru terkait implementasi kurikulum 2013.

Pembahasan

Kebijakan Pendidikan Era Reformasi

Amri et al., (2021) berpendapat jika dalam era reformasi ini, kesempatan mempunyai kebijakan yang reformatif dan revolusioner di bidang pendidikan sangat terbuka lebar. Implementasi pendidikan yang dulu desentralistik kini berubah bentuk menjadi sentralistik. Kesempatan diberikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan. Dalam pendidikan tahun 1999, pendidikan dijadikan sebagai sektor pembangunan terdesentralisasi melalui UU No. 22 tahun 1999. Yang kemudian pemerintah memperkenalkan yang disebut dengan

"Manajemen berbasis sekolah". Manajemen sekolah yang berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan sekolah ini lah yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah (Anwar, 2019).

Kemudian, UU No. 02 tahun 1989 yang menjadi ketentuan kebijakan pendidikan di era orde baru digantikan dengan UU No. 20 tahun 2003, pada tahun 2003. Pendidikan diartikan sebagai 'sebuah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar sehingga peserta secara aktif mengembangkan potensi mereka untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara' dimulai dari diberlakukannya undang-undang tersebut. Ada juga hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional tersebut.

Pengembangan lokalitas menjadi arah pendidikan di masa reformasi. Di mana sasaran pendidikannya yaitu masyarakat suatu daerah dilingkungan sekolah itu sendiri. Dengan berfokus pada keterampilan dan pengetahuan yang akan didapatkan siswa di sekolah. Dua kurikulum yaitu KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) digunakan di masa reformasi. Sesudah 2 (dua) tahun pelaksanaannya, KBK yang mulanya menggantikan kurikulum 1994, digantikan lagi dengan KTSP.

Dalam kegiatan pembelajaran KBK memperhatikan fleksibilitas. Pertimbangan utama guru dalam kegiatan pembelajaran adalah kemampuan siswa, dan juga siswa menjadi *center* dalam proses belajar di kelas. Peran guru yaitu sebagai fasilitator, pendamping, dan rekan dalam melakukan eksplorasi. Berbagai metode dan pendekatan bisa digunakan dalam KBK dan sumber belajar dapat diperoleh dari sumber lain yang memenuhi standar pendidikan, sehingga tidak hanya guru saja sebagai sumber belajarnya. (Fat et al., n.d.) berpendapat bahwa ruang diskusi guna mendapatkan suatu informasi dan pengetahuan terbuka lebar bagi siswa karena siswa diperlakukan sebagai objek dalam proses pendidikan.

Beberapa karakteristik utama KBK menurut (Fat et al., n.d.), yaitu:

a. Tuntasnya materi bukan hal yang ditekankan, tetapi ketercapaian kompetensi siswa.

- b. Penyesuaian potensi siswa (normal, sedang, dan tinggi), perluasan, dan pendalaman kurikulum.
- c. *Student center*.
- d. Proses dan hasil menjadi orientasi utama.
- e. Menggunakan pendekatan yang kontekstual dan beragam.
- f. Sumber pengetahuan bukan hanya guru.
- g. Sumber belajar bukan hanya buku.
- h. Belajar sepanjang hayat.
- i. Belajar mengetahui (*learning how to know*),
- j. Belajar melakukan (*learning how to do*),
- k. Belajar menjadi diri sendiri (*learning how to be*),
- l. Belajar hidup dalam keberagaman (*learning how to live together*).

Menurut penjelasan Ritonga (2018), KBK membuat "kebingungan" terpisah, baik untuk pendidik maupun peserta didiknya, karena sering berubah-ubah. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa seolah-olah menjadi kelinci percobaan. Di samping itu, pemerintah harus mencari kurikulum yang terbaik dan berdampak besar pada kualitas pendidikan. Jadi, tidak heran apabila baru satu tahun kurikulum ini dijalankan, sudah ada pengusulan dan penggantian kurikulum baru.

Sedangkan KTSP dan Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 15, merupakan kurikulum operasional yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Perumusan KTSP dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan) (Ritonga 2018).

(Fat et al., n.d.) Dengan memperhatikan minat dan kemampuan siswa serta kepentingan lingkungan, sekolah diberikan hak untuk merumuskan

silabus pendidikannya masing-masing. Seperti halnya arah tujuan pendidikan pada masa reformasi, KTSP juga mendorong lokalitas pendidikan. Di dukung oleh pendapat (Lama, Baru, and Kerja 1994) sekolah dan guru harus mampu mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan pemerintah dalam bentuk silabus dan penilaiannya juga disesuaikan dengan kondisi sekolah dan lingkungannya. Elemen teoritis dan praktis dikembalikan pada tempatnya dalam KTSP. Akan tetapi, unsur praktis lebih diutamakan dari unsur teoritisnya. Walaupun tergambarkan pendidikan di masa reformasi sudah mengalami berbagai perubahan yang mengarah ke pendidikan yang lebih baik, tetapi pada masa ini pendidikan juga belum dapat disimpulkan berhasil.

Alasannya adalah dengan belum adanya kebebasan penuh dari pemerintah dalam menyusun pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal seperti yang diamanatkan dalam kurikulum KTSP. Contohnya adalah penentuan kelulusan siswa yang masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah, padahal kemampuan siswa setiap daerah berbeda-beda. Contoh lain adalah guru masih mendominasi siswa dalam pembelajarannya meskipun sudah ada aturan yang mengatur bahasa siswa setara dengan guru. Sehingga, dapat ditarik satu benang merah bahwa hak-hak dan kepentingan siswa belum diperjuangkan (Lama, Baru, and Kerja 1994).

Pada awalnya, perubahan dari KBK ke KTSP diharapkan dapat memperbaiki kurikulum. Di mana silabus dan pembelajarannya dapat ditentukan oleh sekolah. Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbunyi "yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator,

motivator, pemacu, perekraya pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik" adalah sebagai bukti harapan dari perbaikan kurikulum dari KBK ke KTSP (Amri, Rifma, and Syahril 2021).

Sebab, seperti yang jua diungkapkan Juliya & Herlambang, (2021), memotivasi siswa dalam pembelajaran merupakan hal paling penting yang harus dilakukan guru. Namun, selang beberapa tahun kemudian, peradaban semakin berkembang, sehingga urgensi pendidikan juga mengalami perubahan menyesuaikan tuntutan zaman, yang mengakibatkan digantinya KTSP dengan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 (K13).

(Lama, Baru, and Kerja 1994) menjelaskan jika dalam hal pembangunan pendidikan di masa reformasi pemerintah mengalokasikan dana sebanyak 20% dari APBN, sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945. Amanat tersebut berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBN, serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Hal ini dilakukan selain untuk menjalankan amanat UUD 1945, juga demi menyokong kemajuan kualitas, kuantitas, dan mutu pendidikan di Indonesia.

Kebijakan Pendidikan Era Industri 4.0

Era revolusi industri 4.0 merupakan suatu era yang terjadi bersamaan dengan dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu cepat dalam setiap lini kehidupan. Majunya teknologi dalam segala aspek kehidupan manusia ini juga turut menumbuhkan sebuah kebudayaan baru, nilai dan norma, serta masyarakat yang berkepribadian baru. Manusia yang lahir dari berkembangnya teknologi inormasi ini merupakan Generasi zen dan generasi α , yang kemudian dijuluki sebagai digital native. Lebih lanjut, digital natives

ini didefinisikan sebagai suatu generasi yang dalam kehidupannya tidak dapat dipisahkan atau telah terkondisi dengan lingkungan teknologi digital (Mardina 2011).

Digital native merupakan individu dengan karakteristik oportunistik serta penerima segala yang bergantung pada tiap-tiap kemudahan yang ditawarkan oleh lingkungan yang memiliki akses online dalam segala hal, (menginginkan terjadinya akses berita secara cepat); gemar melakukan kerjasama secara berjejaring; *multitasking*; menggemari langkah kerja yang dilakukan secara paralel; lebih menyukai penyajian hal-hal dengan karakter interaktif dibandingkan menggunakan tulisan; menggemari pekerjaan yang dilakukan dengan tampilan berupa permainan; menginginkan adanya sanjungan atau penghargaan, menyukai hal-hal yang sifatnya praktis; koneksi dengan acak (*hypertext*).

Sejalan dengan hal-hal yang telah disebutkan, penelitian lain pula memaparkan sesuatu yang searah dengan pendapat tersebut hingga kemudian dapat disimpulkan jika model dan cara belajar *digital native* lebih mengkehendaki cara yang cepat dan mudah, membuat akses dengan random, mengoperasikan berita konkret dengan penyesuaian terhadap keadaan serta dapat pula berita yang dididapatkan bersifat tepat dan berdaya guna. Ciri dari masyarakat digital yang telah dipaparkan tersebut dapat menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi berkembangnya pendidikan di Indonesia.

Eksistensi *digital native* dapat menjadi tantangan dalam institusi pendidikan tak lain karena munculnya teknologi digital pada era ini turut menghadirkan kesenjangan karakter dan pengetahuan antara guru yang merupakan *digital immigrants* dengan siswa yang merupakan *digital natives*. Selain itu,

berkembangnya teknologi juga memandang perlu adanya suatu pembaruan pendidikan agar selaras dengan perkembangan zaman yang terjadi. Maka dari itu, terdapat hal-hal yang perlu diupayakan, 1) pembaruan kurikulum, 2) pendayaan teknologi informasi dengan efektif. Masuknya revolusi industri 4.0 pada ranah pendidikan memerlukan adanya revitalisasi kurikulum agar terjadi perbaikan capaian siswa, antara lain (Yusnaini and Slamet 2019): 1) berfikir secara kritis 2) inovatif serta kreatif 3) mengembangkan kemampuan serta komunikasi 4) kolaborasi serta memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim 5) memiliki sifat percaya diri.

Pengembangan kurikulum juga didasari atas kepentingan terhadap suatu pembaruan rumusan serta langkah-langkah pendidikan sehingga gejala kebutuhan bangsa, negara, dan masyarakat dapat terpenuhi selaras yang terdapat pada tujuan pendidikan nasional. Dewasa ini, perkembangan teknologi, pengetahuan, serta seni merupakan faktor mutlak atas perkembangan pendidikan Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena tuntutan-tuntutan dalam masyarakat mengalami perkembangan, mulai dari masyarakat hingga dunia kerja dan pendidikan memiliki tuntutan baru yang pada akhirnya memberi pengaruh pada tuntutan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar pendidikan dapat selalu menjadi jawaban atas perubahan segala sesuatu dalam zamannya. Dengan demikian maka hasil atau output dari dunia pendidikan dapat memberikan bekal untuk merealisasikan terciptanya masyarakat yang berdasar pada ilmu pengetahuan secara optimal.

Kurikulum 2013 dirumuskan berdasarkan teori pendidikan berbasis standar, serta kurikulum berdasar kompetensi. Pendidikan berbasis standar mengedepankan terciptanya kompetensi

nasional untuk menjadi penentu capaian minimal warga negara dengan dirangkum sebagai kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan, kompetensi isi, standar alumni, kompetensi pelaksanaan, kompetensi sarana serta prasarana, kompetensi biaya, standar pengelolaan, dan kompetensi evaluasi pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan dalam rangka menciptakan kemerdekaan belajar sehingga tiap siswa memiliki pengalaman belajar yang mumpuni sebagai aktualisasi pengoptimalisasian pengembangan kemampuan dalam berpengetahuan, bertindak, bersikap, serta berketerampilan (Fernandes 2019).

Kurikulum 2013 menerapkan: (1) pembelajaran oleh guru atau pendidik (*taught curriculum*) pada bentuk proses yang dikembangkan terdiri atas kegiatan pembelajaran di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat; serta (2) peserta didik mendapat pengalaman belajar secara langsung (*learned-curriculum*) yang disesuaikan dengan kemampuan awal, latar belakang, serta karakteristik yang dimiliki. Pengalaman belajar yang diperoleh secara langsung oleh seorang peserta didik merupakan hasil belajar bagi dirinya secara individu, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik merupakan hasil dari kurikulum.

Kurikulum 2013 mengandung rumusan framework pembelajaran abad ke-21 yang disebut dengan *Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard* (IP-21CSS). Pada rumusannya, dipaparkan jika pengajaran perlu ditekankan dalam proses mengembangkan kecakapan 4C yang terdiri atas kecakapan pemecahan masalah serta berfikir kritis, (kecakapan kolaborasi serta komunikasi, kecakapan dalam berinovasi serta kreatifitas), serta pengembangan kecakapan literasi teknologi informasi serta komunikasi.

Selain dari itu guna siswa tetap menjadi individu yang berbudaya, maka pendidikan Abad-21 pula mengarahkan peserta didik dalam pengokohan pendidikan karakter beradar pada pembangunan karakter serta moral keagamaan. Muatan-muatan yang terdapat dalam kurikulum 2013 tersebut begitu sesuai dengan era Revolusi Industri 4.0.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan merupakan langkah secara keseluruhan serta output dari percetusan tahap-tahap strategi pendidikan, yang diruaukan atas visi serta misi pendidikan, hingga terwujudlah capaian pendidikan dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan haruslah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan segala perubahan yang ada di dalamnya. Pada masa reformasi, pelaksanaan pendidikan ditujukan untuk pengembangan lokalitas. Di mana target dari pendidikannya merupakan masyarakat yang berada dalam kawasan daerah itu sendiri dengan berpedoman pada KBK dan KTSP. Kurikulum yang diterapkan dalam era revolusi industri 4.0 merupakan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, dinyatakan bahwa penekanan pembelajaran harus pada pengembangan keterampilan 4C diantaranya *critical-thinking and problem-solving skills*, (*communication and collaboration skills*, (c) *creativity and innovation skills*), serta literasi teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, kurikulum 2013 juga mengarahkan pendidikan dalam pengembangan karakter lewat pembentukan karakter (*character building*) serta norma agama (*spiritual value*) dalam membekali peserta didik agar tidak hanya pandai dan cerdas pada bidang pengetahuan serta teknologi, namun juga berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, U, R Rifma, and S Syahril. 2021. "Konsistensi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3 (5): 2200–2205. <https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/778>.
- Anwar, Saiful. 2019. "Orba Dan Reformasi" 6 (2): 87–91.
- Fat, Mona, P D F Pack, Revisi Makalah, Sejarah Pemikiran, Pendidikan Islam, Mona Fat, Revisi Makalah Perbandingan, et al. n.d. "Perbandingan Pemikiran Pendidikan Pada Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi."
- Fernandes, Reno. 2019. "Relevansi Kurikulum 2013 Dengan Kebutuhan Peserta Didik Di Era Revolusi 4.0." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 6 (2): 70. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.157>.
- Hasbullah, M. 2015. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi Dan Kondisi Objektif Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Herlambang, Yusuf Tri. 2016. "Pendidikan Kearifan Etnik Dalam Mengembangkan Karakter." *EduHumaniora / Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru* 7 (1). <https://doi.org/10.17509/eh.v7i1.2789>.
- Herlambang, Y.T. 2021. *Pedagogik: Telaah Kritis Ilmu Pendidikan Dalam Multiperspektif*. Bumi Aksara.
- Juliya, Mira, and Yusuf Tri Herlambang. 2021. "Analisis Problematika Pembelajaran Daring Dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Belajar Siswa." *Genta Mulia XII* (1): 281–94.
- Lama, Orde, Orde Baru, and D A N Kabinet Kerja. 1994. "PERATURAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA Abstrack Abstrak Pendahuluan Pada Dasarnya , Landasan Adalah Suatu Alas Atau Dasar Pijakan Dari Sesuatu Hal Atau Suatu Titik Tumpu Atau Titik Tolak Dari Sesuatu Hal Atau Suatu Fundasi Tempat Berdirinya" 1 (2): 56–78.
- Mardina, Riana. 2011. "Potensi Digital Natives Dalam Representasi Literasi Informasi Multimedia Berbasis Web Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Pustakawan Indonesia* 11 (1): 7.
- Mareta, Iske, Indah Ayuningtyas, Dina Rosa, and Nur Wahdaniah Ijatul Islamiah. 2021. "Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah Dan Siswa Dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan* 30 (2): 235. <https://doi.org/10.32585/jp.v30i2.1522>.
- Maskuri. 2017. "KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA." *JPII* 2: 78–91.
- Nanang, Fatah. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, and Dwijowijoto. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prasojo, Lantip Diat. 2012. "Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan* 4 (02): 19–27.
- Ritonga, Maimuna. 2018. "Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi." *Bina Gogik* 5 (2): 1–15.
- Sagala, S. 2017. *Human Capital: Membangun Modal Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas*. Depok: Kencana.
- Sasikirana, Vania, and Yusuf Tri Herlambang. 2020. "URGENSI MERDEKA BELAJAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN SOCIETY 5.0." *E Tech* 08. <https://doi.org/10.1007/XXXXXX-XX-0000-00>.
- Solichin, M. 2015. "Imlementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi." *Jurnal Studi Islam* 6 (2): 148–78.
- Syafaruddin, S. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Rineka Cipta.

- Yuliah, Elih. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30: 129–53.
- Yusnaini, and Slamet. 2019. "Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan Dan Peluang Dalam Upaya Meningkatkan Literasi Pendidikan." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang* 2: 1073–85. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2668>.